

PENINGKATAN SDM PERTAHANAN INDONESIA UNTUK MENGHADAPI REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS

DEVELOPMENT OF INDONESIAN DEFENSE HUMAN RESOURCES IN FACING REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS

Safri Hidayat¹

Kostrad
(safrihidayat95@yahoo.com)

Abstrak - Dinamika hubungan internasional yang terus berubah *vis-a-vis* teknologi pertahanan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kinerja. Dalam konteks Indonesia, kinerja dan kompetensi tersebut diwujudkan dalam norma idealis, inovatif, kreatif dan intelektualitas tinggi. Di tengah arus globalisasi yang demikian besar dan sebagai negara demokrasi, peranan sipil dan militer sama pentingnya dalam mewujudkan SDM yang dapat menghasilkan teknologi pertahanan yang memiliki efek *deterrence*. Perubahan teknologi pertahanan berkaitan pula dengan revolusi dalam urusan-urusan kemiliteran (*Revolution in Military Affairs/RMA*) yang terus bergerak maju dan mempengaruhi pula interaksi hubungan internasional. Dengan memperhatikan dinamika politik internasional, RMA dan SDM yang ada saat ini, kerangka konseptual yang digunakan dalam tulisan ini tidak terlepas dari aspek tersebut dengan tetap berpegang teguh pada sejarah dan ideologi negara Pancasila. Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan SDM handal tanpa lepas jati dirinya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dalam menghadapi perubahan, peranan pendidikan diperlukan sebagai lembaga yang terus mengikuti perubahan secara aktual dan faktual. Selain itu, penelitian dan pengembangan juga dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan SDM yang handal. Demikian pula dalam hal pertahanan, Indonesia telah memiliki Universitas Pertahanan Indonesia yang berkaitan dengan topik-topik pertahanan. Kerja sama dengan lembaga pendidikan lain secara otomatis akan dilakukan melalui masing-masing individu yang telah, sedang dan akan melakukan penelitian terkait dengan pertahanan. Peranan Universitas Pertahanan Indonesia ini akan semakin penting di masa mendatang dengan membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan sebagainya yang berada di lingkungan sipil maupun militer.

Kata kunci: hubungan internasional, *Revolution in Military Affairs*, sumber daya manusia, kerjasama, penelitian

Abstract - *The dynamics of international relations have been changed vis-a-vis defence technology which need competency of human resources. In the context of Indonesia, competency is articulated in the norms of idealist, innovative, creative and high intelligent. In the wave of globalization and as a democracy country, civilian and military roles are equally important to create human resources which can produce defence technology with deterrence effect. Changing in the world of defence*

¹ Letkol Czi Safri Hidayat, psc, M.Sc adalah alumni Akademi Militer tahun 1995. Jabatan Pamen Kostrad. Kandidat Doktor Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Mahasiswa pascasarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran. Pernah mengikuti Selapa di Fort Leonardwood Amerika Serikat dan Seskoad di Defence Services Staff College India.

technologies are connected with Revolution in Military Affairs (RMA) and influential to international relations. Conciousness of the dynamics of international politics, RMA, and human resources these days are influencial as theoretical conceptual in this essay and collaborated within the aspect of short historical flash back and national ideology Pancasila. This can be seen as fundamental framework to create human resources in gaining national interest. Furthermore, role of education can follow the dynamics actually and factually. Research and development, on the other hand, run in the education field as well to create well-educated human resources. In the defence field, Indonesia has Indonesia Defence University (IDU) which is related to the topics of defence issues. The IDU cooperates with others institutions, individually or institutionally by means of research and development in the past, present and foreseeable future. The roles of IDU are important in the future to establish cooperation with other educational and research of both civilian and military institution.

Keywords: international relations, RMA, Human Resources, cooperation, research

Pendahuluan

Penguasaan teknologi tidak terlepas dari peran institusi pendidikan formal dan non formal dalam menghasilkan sumber daya manusia. Institusi pendidikan masih perlu dikembangkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang khusus yang berkaitan dengan teknologi pertahanan dan keamanan. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam membuat produk teknologi, termasuk penguasaan teknologi militer sudah menginjak pada pemasaran global. Kemampuan membuat *platform* produk teknologi militer yang tidak berbasis kendali elektronika sebagian besar sudah teruji dan laik operasi. SDM yang ada telah mempunyai keahlian dalam pengoperasian dan perawatan peralatan, dan SDM lembaga litbang telah mempunyai kemampuan dalam perancangan, pembuatan prototipe dan pengujian beberapa peralatan. Namun demikian, masih terbatasnya pengembangan kemampuan SDM karena kurangnya kesempatan yang diberikan,² menuntut peluang yang lebih besar lagi dimasa mendatang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan kemajuan teknologi militer.³ Namun demikian, Sayidiman menyatakan bahwa selain kemajuan teknologi, tentunya bisa berupa permasalahan politik, sosial dan ekonomi. Walaupun, Sayidiman lebih lanjut menyatakan bahwa tidak semuanya tergantung pada kecanggihan teknologi

² Kementerian Riset dan Teknologi, *Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan Indonesia 2005 – 2025*, (Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi, 2006), hlm. 10.

³ Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2008), hlm. 61-67.

militer dalam mempertahankan kepentingan suatu negara seperti halnya yang terjadi dalam perang Vietnam, Perang Afganistan, dan sebagainya.⁴

Sebagai konsekuensi untuk mendukung kesiapan militer, maka Industri pertahanan negara merupakan salah satu faktor penting dalam usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Dalam UU No.16/2012 pasal 10 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan industri pertahanan adalah: industri alat utama; industri komponen utama dan/atau penunjang; industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan industri bahan baku. Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa Industri Pertahanan memiliki tujuan mewujudkan tercapainya kemampuan pertahanan negara. Undang-Undang ini memuat kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang penguasaan iptek melalui industri pertahanan. Hal ini dilakukan dengan cara kegiatan penelitian dan pengembangan riset dan teknologi maupun transfer teknologi pada saat pengadaan Alutsista guna memperkuat sistem pertahanan; mengurangi/meniadakan ketergantungan terhadap penggunaan Alutsista produk luar negeri; standarisasi Alutsista, agar terjadi efisiensi dan efektifitas dalam penyiapan sumber daya manusia, pembinaan materiil serta pengoperasiannya; mampu memberikan peningkatan terhadap perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja serta mengurangi devisa negara yang keluar; dan memudahkan terhadap langkah pengembangan teknologi yang lebih tinggi dengan pijakan teknologi yang telah dikuasai; serta menjamin terhadap kerahasiaan pertahanan negara dan meningkatkan daya tangkal (*deterrence*).

Pengembangan industri pertahanan memerlukan pengelolaan manajemen yang visioner melalui peningkatan kreativitas, inovasi, mengandalkan SDM yang memiliki idealisme dan intelektualisme, serta membangun daya saing tinggi. Percepatan kemandirian (kemampuan sendiri, kebebasan, dan ketidaktergantungan) Industri Pertahanan Nasional, memerlukan kerja sama sinergis antara pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri. Kebijakan industri pertahanan dilaksanakan melalui program pengembangan industri pertahanan serta program penelitian dan pengembangan pertahanan yang mencakup konsep pertahanan dan keamanan; kerja sama industri pertahanan antara perguruan tinggi dengan lembaga penelitian dan pengembangan; dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 56-59.

bidang desain rekayasa. Pelaksana penelitian dan pengembangan serta perekayasaan terdiri atas unsur: lembaga penelitian dan pengembangan; perguruan tinggi; institusi penelitian dan pengembangan, baik lembaga pemerintah maupun swasta nasional di bidang pertahanan dan keamanan; Pengguna; dan industri alat utama. Penelitian dan pengembangan serta perekayasaan tersebut dikoordinasikan oleh KKIP bersinergi dengan kegiatan produksi dan pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Dalam rangka penelitian dan pengembangan serta perekayasaan, pemerintah membangun fasilitas khusus pendukung Industri Pertahanan; menyediakan fasilitas program pendidikan dan pelatihan khusus peningkatan mutu sumber daya manusia Industri Pertahanan; dan/atau menyediakan anggaran untuk penelitian dan perekayasaan.

Selain memperhatikan kebijakan domestik, sumber daya manusia yang akan melakukan peningkatan teknologi tentunya memperhatikan faktor lain yaitu hubungan internasional baik di kawasan (regional) dan global. Berkaitan dengan teknologi pertahanan maka perlu diketahui pula tentang revolusi dalam urusan-urusan militer (*Revolutions in Military Affairs/RMA*). Begitu kompleksnya dan saling terkait antara usaha yang harus dilakukan, maka manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mewujudkan SDM yang idealis, kreatif, inovatif dan cerdas agar kesinambungan perkembangan teknologi pertahanan Indonesia sejalan dengan dinamika hubungan internasional dan RMA. Menghadapi dinamika dan persaingan bebas global tersebut maka ketergantungan organisasi pada manajemen sumber daya manusia yang semakin bermutu tinggi akan semakin besar pula. Tanpa mengurangi pentingnya perhatian yang tetap harus diberikan pada manajemen sumber-sumber organisasional lainnya, tidak bisa disangkal bahwa perhatian utama harus diberikan pada manajemen sumber daya manusia.

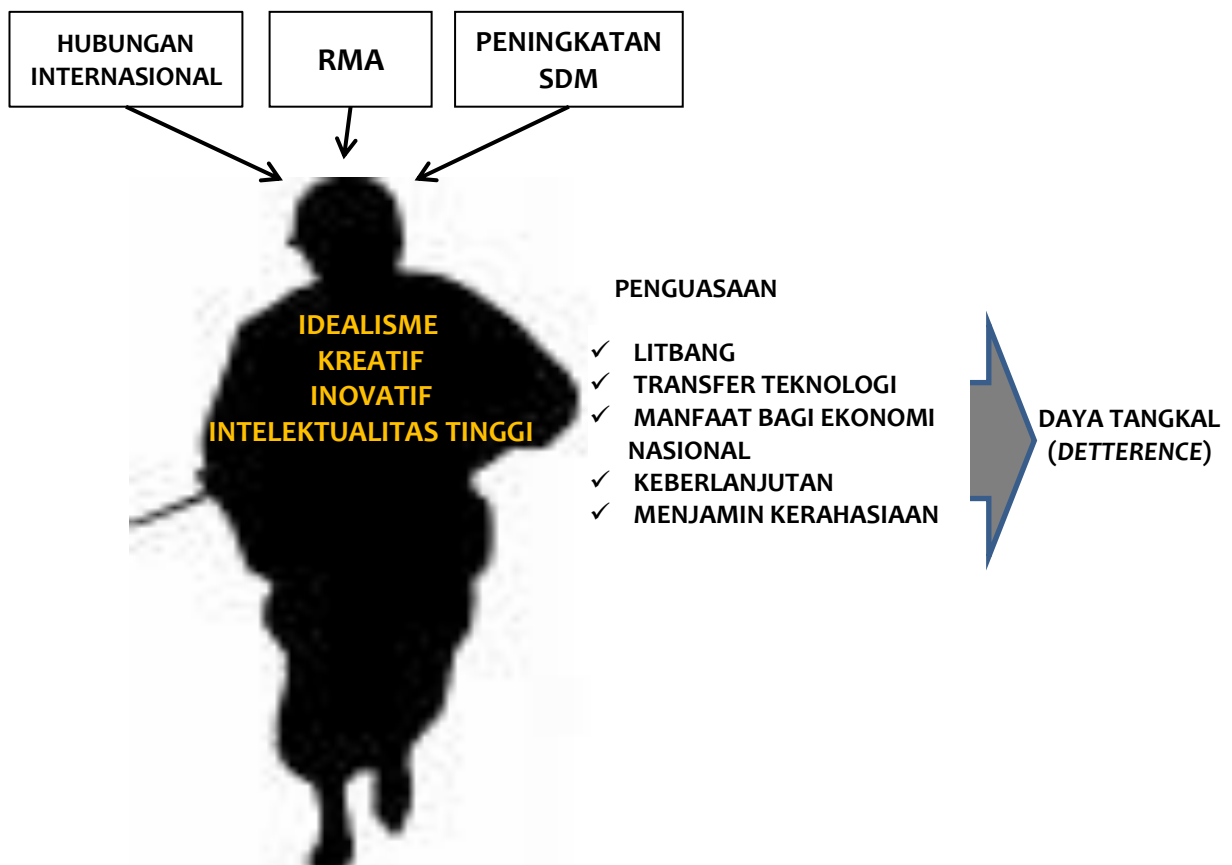
Selain itu, kemajuan teknologi militer memberikan dampak terhadap diplomasi suatu negara yang dapat ditunjukkan kepada negara lain adalah kekuatan militer.⁵ Dalam kondisi damai tentu saja kekuatan militer ini belum tentu digunakan untuk melakukan intervensi namun ditujukan sebagai cara menunjukkan kesiapan militer suatu negara

⁵ Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations, The Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A. Knopf, 1948), hlm. 55.

terhadap negara lain sehingga memberikan kesan terhadap negara yang merupakan aliansi maupun potensi musuh bagi kepentingan nasional suatu negara.

Dari uraian di atas, ada prasyarat SDM yang diamanahkan dalam Buku putih pertahanan 2014 yaitu idealisme, kreatif, inovatif dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Sesuai UU No.16/2012, kegiatan yang dilakukan adalah penguasaan iptek melalui penelitian dan pengembangan dan transfer teknologi, mengurangi/ meniadakan ketergantungan terhadap produk luar negeri; memberikan peningkatan bagi perekonomian nasional; memudahkan bagi pengembangan teknologi yang lebih tinggi; dan menjamin terhadap kerahasiaan pertahanan negara dan meningkatkan daya tangkal (*deterrence*) serta mengikuti dinamika hubungan internasional dan konsekuensi yang ditimbulkan sejalan dengan RMA.

Gambar 1. Visualisasi Hubungan International, RMA, dan Peningkatan SDM



Sumber: Hasil elaborasi penulis dari berbagai sumber

Kerangka Konseptual

Kenneth Waltz membagi tiga level dalam analisis politik internasional yaitu sistem internasional, negara (*state*) dan individu.⁶ Tanpa bermaksud melakukan debat tentang level analisa tersebut penulis mengajak untuk melihat tentang sistem internasional yang menurut Waltz adalah sistem yang berada di luar negara. Dalam berinteraksi guna mencapai kepentingan nasionalnya, maka negara atau masyarakat dapat melakukan hubungan internasional.⁷ Kelompok yang tercakup dalam hubungan internasional tersebut menurut Quincy Wright termasuk bangsa, negara, pemerintah, rakyat, wilayah, organisasi internasional, organisasi perindustrian, organisasi kebudayaan, dan organisasi keagamaan.⁸ Dengan demikian muncul pula pandangan kawasan/regionalisme dengan segala dinamika politik internasionalnya.⁹ Negara-negara melakukan politik luar negeri sebagai cabang dari politik internasional¹⁰ dan dilakukan dalam mencapai kepentingan nasionalnya dan cara-cara mencapainya.¹¹ Dalam konteks Indonesia, politik luar negeri yang dijalankan adalah bebas aktif. Di tengah persaingan global dalam sistem internasional, dimana masing-masing negara mencapai kepentingan nasional dengan cara-cara yang diatur dalam kebijakan luar negerinya maka kemajuan teknologi militer merupakan bagian dari hubungan internasional itu sendiri.¹²

Berakhirnya Perang Dingin menimbulkan persaingan baru yang tidak lagi semata-mata aspek militer dan politik (*high politics*), namun sudah mengarah pada persaingan ekonomi, ide demokrasi, *human security*, dan sebagainya. Globalisasi dengan membawa isu demokrasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup semakin kuat mempengaruhi

⁶ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1979), Bab II dan III.

⁷ K.J. Holsti, *International Politics*, (New Delhi: New Delhi British of Columbia Pearl Offset Press, 1976), hlm. 21-22.

⁸ Quincy Wright, *The Study of International Relations*, (Appleton: Century-Crofts, 1957), hlm.6.

⁹ Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia in ASEAN, Foreign Policy and Regionalism*, (Singapore: ISEAS, 1994).

¹⁰ Herald Sprout dan Margareth Sprout, *Man-Milieu Relationship Hypothesis in the Context of International Politics*, (Princeton: Center of International Studies, 1956), hlm. 6.

¹¹ Cicil V. Crabb Jr, *American Foreign Policy in the Nuclear Age*, (New York: Harper & Row, 1972), hlm. 1.

¹² Prof. Dr. Mochtar. Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, (Kumpulan Karangan dan Pidato), diedit oleh Edi Damian dan Budiono Kusumohamidjojo, (Bandung: Alumni, 1983) dan H.M. Sabir, *Politik Bebas Aktif: Tantangan dan Kesempatan*, (Jakarta: C.V. Haji Masagung, 1987).

negara-negara yang sebelumnya dipimpin oleh rezim-rezim otoriter.¹³ Ide liberal dengan mengedepankan demokrasi yang berangkat dari pandangan Immanuel Kant dalam *Perpetual Peace*,¹⁴ dilanjutkan Tocqueville, Woodrow Wilson dan tentang kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan menuntut masing-masing negara yang belum menjalankan demokrasi untuk segera menyesuaikan dengan ide tersebut.¹⁵ Dalam Indonesia menerapkan demokrasi dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila. Demokrasi yang diusung oleh barat dengan supremasi sipil mengakibatkan perubahan besar dalam dinamika politik domestik Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Isu militer yang tidak lagi mendominasi, namun demikian disadari bahwa kemajuan teknologi kemiliteran tetap diperlukan dalam memperkuat pertahanan negara.

Hubungan internasional dewasa ini tidak lagi didominasi oleh perspektif realis, namun isu ekonomi dan perdagangan, energi, lingkungan mengubah pandangan aktor-aktor negara dan non negara justru memainkan peran yang besar dalam hubungan natar negara. Kerjasama yang dibangun oleh actor-aktor hubungan luar negeri ini juga berhubungan dengan kemajuan teknologi yang dipasarkan dan disebarluaskan oleh negara maju ke Indonesia. Perkembangan teknologi militer ini, telah mewujudkan segmentasi pasar dalam ekspansi produk masing-masing negara maupun produsen teknologi tersebut. Kerja sama terjalin lebih luas dengan segala konsekuensinya dalam hubungan internasional. Dengan demikian, batas teritorial antar negara semakin tidak kentara (*bordered but borderless*).

Definisi klasik tentang batas negara yang dalam Konvensi Montevideo 1933 sudah semakin pudar karena munculnya *TNC (Trans National Corporation)*, *MNC (Multi National Corporation)* serta kejahatan yang seiring dengan pertumbuhan tersebut seperti sebuah koin dengan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kriminal yang muncul juga merupakan kejahatan trans nasional dengan skala yang lebih rendah

¹³ Wolfgang Merkel, *Demokrasi di Asia: Sebuah Benua antara Diktator dan Demokrasi*, (Terjemahan CVD. Indarwati Pareira dan Andreas Pareira), (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005).

¹⁴ John MacMillan, "Liberal Internationalism" dalam Martin Griffiths (Ed), *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*, (New York: Routledge, 2007), hlm.22.

¹⁵ Noam Chomsky, *Hegemony or Survival, America's Quest for Global Dominance*, (London: Penguin Group, 2004).

(*low intensity*). Munculnya perang perpanjangan tangan (*war by proxy*) merupakan efek dari dinamika transnasional itu sendiri. Dalam menghadapi tantangan lawan yang demikian sporadis dan tidak terorganisir maka kemajuan teknologi menjadi mutlak.

Dinamika internasional dewasa yang sangat dinamis-oleh SBY disebut sebagai *dynamic equilibrium* (2003) membuat sikap waspada semakin tinggi dalam menghadapi perkembangan tersebut guna menjaga kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai dampaknya kepentingan militer sekalipun tidak lagi dalam konteks perang dingin, justru membuat negara-negara tetap focus memperkuat teknologi militernya melalui revolusi dalam urusan-urusan militer, baik dalam bidang teknologi itu sendiri, perubahan organisasi dan doktrinnya dalam menentukan posisi tawarnya (*bargaining position*) dan kepentingan diplomasinya.

Teknologi Militer: Pendekatan RMA (*Revolutions in Military Affairs*)

Kapasitas industri yang berkaitan dengan militer akan lebih efektif bila sebuah negara, selain memiliki sumber daya alam yang dapat mendukung industrinya juga memiliki kemampuan dalam mengelola sehingga dapat digunakan bagi kepentingan militer maupun sipil dalam mencapai kepentingan nasional. Morgenthau mencontohkan kekayaan alam uranium di Kongo yang merupakan jajahan Belgia memiliki pengaruh kecil bagi Belgia untuk kepentingan industri militernya sebagai efek penggetar pada masa Perang Dingin. Sebaliknya bagi Ceko Slowakia dan Amerika Serikat, kekayaan uranium tersebut berpengaruh besar bagi kepentingan pertahanannya. AS memiliki SDM dan industri yang dapat mengelola kekayaan alam uranium tersebut bagi kepentingan nasionalnya dalam menghadapi persaingan bipolaritas pada saat itu.

Perkembangan RMA yang terus berlangsung hingga dewasa ini, pada awalnya dimulai dari Uni Soviet di era Perang Dingin dengan titik berat pada teknologinya.¹⁶ Namun selanjutnya berkembang menjadi lebih luas lagi sehingga sebagian besar beranggapan bahwa RMA tidak hanya berkaitan dengan teknologi namun juga kapabilitas dan efektivitas militer suatu negara. Hal ini muncul karena adanya manfaat dan pengaruh

¹⁶ Michael Raska, "The 'Five Waves' of RMA Theory, Processes, and Debate", dalam Pointer, *Journal of The Singapore Armed Forces*, Vol.36, No.3-4, 2011, hlm.2.

dari perkembangan teknologi terhadap perubahan sistem, perubahan metode-metode operasional dan organisasi militer. Dengan demikian RMA tidak akan bisa terlepas dari kompleksitas taktis, sosial, politik, organisasi, dan konsepsi baru dalam menghadapi ancaman.¹⁷ Sebagai konsekuensinya, perlu dibuat konsepsi tentang kekuatan militer guna mencapai kepentingan politik negara dengan kemampuan negara untuk mengenali (*recognize*), mengantisipasi (*anticipate*), menggali (*exploit*) dan menjamin kelangsungan (*sustain*) secara komprehensif inovasi militer .

Perubahan kondisi strategis dan operasional yang dihadapi oleh militer semakin kompleks seperti perang hibrida, ancaman non konvensional (*terorisme, insurgency*, dan perang asimetris, sehingga dalam menghadapinya memerlukan peranan komponen lainnya. Selain itu menurut Bitzinger, faktor lain yang mempengaruhi adalah kondisi geografis dan budaya yang berimplikasi pada ketidakamanan geopolitik, persaingan regional, dan ketidakpastian yang muncul dari berbagai kompleksitas konflik dan ancaman; pertumbuhan ekonomi sehingga memungkinkan untuk membeli senjata terbaru dan menjalankan modernisasi militer; dan globalisasi, konsolidasi dan kompetisi industri pertahanan pasar senjata global.¹⁸ Dengan demikian dinamika hubungan internasional berpengaruh dalam melaksanakan suatu revolusi dalam urusan-urusan militer, dimana aspek yang terus diperbaharui adalah teknologi, doktrin dan organisasi yang akan berdampak pada kapabilitas dan efektivitas militer terhadap dinamika hubungan internasional dan kondisi domestik.

Peningkatan SDM

Aset yang terpenting yang dimiliki suatu institusi adalah SDM. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut dalam suatu organisasi merupakan kegiatan yang saling tergantung antara satu dengan lainnya (*interdependent*).¹⁹ Bahkan menurut Siagian bahwa berbagai institusi meskipun tidak memiliki sumber daya dan kekayaan dalam bentuk uang, akan tetapi jika memiliki sumber daya manusia yang terdidik, terampil,

¹⁷ Williamson Murray, "Thinking about Revolutions in Military Affairs", *Joint Forces Quarterly*, No. 15, 1997, hlm.73.

¹⁸ Richard Bitzinger, *Towards a Brave New Arms Industry?*, (Oxford: Oxford University Press, 2003).

¹⁹ Cynthia D. Fisher, Lyle F. Schoenfeldt, dan James B. Shaw, *Human Resource Management*, 2th Ed. (Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1993).

disiplin, tekun, mau bekerja keras, memiliki budaya kerja, setia meraih kemajuan yang sangat besar untuk institusi dan pribadinya terbuka dengan lebar.²⁰ Selain itu menurut Simamora, beberapa permasalahan sumber daya manusia yang membuat kegagalan perusahaan antara lain: buruknya kualitas karyawan, sikap dan pola pikir negatif dari para pegawai yang sudah berakar kuat dalam perusahaan, tingginya perputaran karyawan yang berbiaya besar dan beralihnya karyawan-karyawan penting ke perusahaan pesaing, serta faktor-faktor lainnya meliputi buruknya program jaminan insentif bagi karyawan.²¹ Dengan demikian, maka kinerja dan kompetensi individu akan mempengaruhi pula terhadap kinerja dan kompetensi organisasi.

Boulter, Dalziel dan Hill mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya.²² Kompetensi merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan oleh Boulter et.al disebut level kompetensi yaitu *Skill, Knowledge, Self-concept, Self Image, Trait, dan Motive*.²³

Menurut Armstrong dan Brown penilaian kinerja didasarkan pada pengertian *knowledge, skill, expertise* dan *behavior* yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik dan analisis lebih luas terhadap *attributes* dan perilaku individu dimana *attributes* terdiri dari *knowledge, skill* dan *expertise*.²⁴ Menurut Mc.Clelland dalam Cira dan Benjamin dengan mengevaluasi kompetensi-kompetensi yang dimiliki seseorang maka dapat diprediksi kinerja orang tersebut.²⁵

Sumber daya manusia merupakan tenaga potensial yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Industri Pertahanan yang terdiri atas unsur keahlian, kepakaran,

²⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.3.

²¹ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi ke-2, (Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN).

²² Nick Boulter, Dalziel Muray, dan Jackie Hill, *People and Competencies: the Route to Competitive Advantage*, (London: Kogan Page, 1997).

²³ *Ibid.*

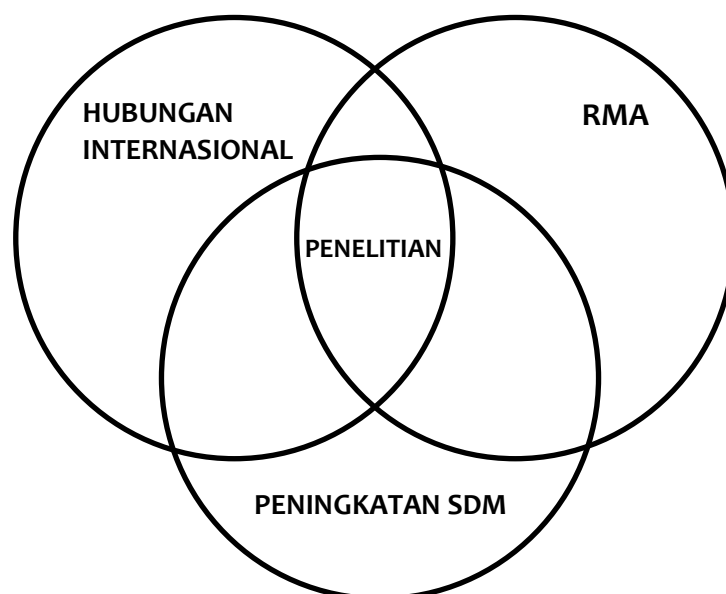
²⁴ M. Armstrong dan D. Brown, "Relating Competencies to Pay: The UK Experience", *Compensation and Benefits Review*, Vol. 30, No.3, 1998.

²⁵ D.J. Cira dan E.R. Benjamin, "Competency Based Pay: A Concept in Evolution", *Compensation and Benefits Review*, Vol.30, No.5, 1998.

kompetensi dan pengorganisasian, serta kekayaan intelektual dan informasi. Setiap unsur sumber daya manusia tersebut harus ditingkatkan daya guna dan nilai gunanya secara terus menerus sesuai dengan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian serta kode etik profesi. Pemerintah, Pengguna, dan Industri Pertahanan menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menguasai teknologi pertahanan dan keamanan yang sarat dengan teknologi tinggi dan ilmu terapan Industri Pertahanan. Teknologi tinggi dan ilmu terapan Industri Pertahanan adalah yang telah dikuasai dari proses Industri Pertahanan dan dikembangkan pada perguruan tinggi nasional. Penyiapan sumber daya manusia meliputi rekrutmen, pendidikan, pelatihan, magang, dan imbalan. Dengan demikian, diperlukan kerja sama antar semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan jaringan informasi, ilmu pengetahuan pertahanan dan keamanan, serta teknologi Industri Pertahanan.

Ketiga faktor diatas yaitu hubungan internasional, revolusi dalam urusan-urusan militer dan peningkatan SDM tentunya bertemu dalam satu wadah yang disebut dengan penelitian. Melalui penelitian yang akan ditemukan manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat digunakan sebagai salah satu dari sekian banyak input yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan terutama berkaitan dengan revolusi yang akan dilakukan dalam urusan-urusan kemiliteran.

Gambar 2. Visualisasi Interseksi Hubungan Internasional, RMA, dan Peningkatan SDM



Sumber: Dielaborasi oleh penulis dari berbagai sumber

Peranan Universitas Pertahanan sebagai Penjuru

Dalam mengelaborasi ketiga unsur di atas, yaitu dinamika hubungan internasional, pandangan RMA, dan peningkatan SDM, maka diperlukan sebuah organisasi yang dapat mengikuti perkembangan tersebut secara terus menerus dan melakukan penelitian secara terus menerus guna menjaga kepentingan nasional Indonesia. Tanpa bermaksud mengesampingkan peranan lembaga pendidikan lain ataupun menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*), maka menurut penulis wadah itu telah tersedia dengan hadirnya Universitas Pertahanan Indonesia. Wadah ini dapat dijadikan sebagai wadah kerja sama antar lembaga penelitian dan pendidikan negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri guna meningkatkan SDM yang dapat menjalankan teknologi militer dalam mencapai kepentingan nasional.

Kerja sama pertahanan merupakan salah satu instrumen diplomasi dalam mewujudkan rasa saling percaya (*confidence building*) melalui langkah-langkah yang lebih konkret, aktif, dan bermartabat. Esensi kerja sama pertahanan yang diselenggarakan Indonesia adalah untuk membangun saling percaya antar bangsa guna mencegah konflik dengan negara lain. Selain itu juga bertujuan untuk membangun kapabilitas pertahanan melalui pendidikan, latihan, peningkatan profesional prajurit, pengadaan Alutsista strategis dan transfer teknologi bagi kemandirian sarana industri pertahanan Indonesia.

Kerja sama pertahanan diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui upaya bersama antarnegara serta menjunjung tinggi hak kedaulatan negara masing-masing. Selain itu, dilakukan kerja sama dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Indonesia serta *major power* yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan, termasuk yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Namun, Indonesia memiliki kerentanan terhadap tekanan politik dari negara lain, karena kemungkinan embargo terhadap peralatan tertentu, sehingga berakibat pada lemahnya kesiapan dan kemampuan penangkalan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberadaan industri pertahanan yang mandiri perlu diwujudkan guna mendukung penyelenggaraan pertahanan yang efektif. Pemberdayaan industri strategis untuk kepentingan pertahanan tidak berarti bahwa Indonesia turut ambil bagian dalam kegiatan perlombaan persenjataan (*arm races*) dan perimbangan kekuatan (*balance of power*). Akan tetapi lebih kepada upaya pencapaian kemandirian dalam pengadaan

sarana pertahanan nasional. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan integritas nasional.

Pada masa penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sebagian warga dilatih untuk kepentingan militer Belanda dan Jepang. Bukan bermaksud untuk menyebut sebagai bagian dari penjajah, namun bila dilihat dari aspek sumber daya manusia maka sebagian kecil rakyat Indonesia yang tergabung dalam kemiliteran itu mengenal teknologi persenjataan mulai dari jenis dan karakteristiknya, modifikasinya dalam menghadapi keterbatasan suku cadangnya pada masa perjuangan merebut kemerdekaan. Pemaksaan yang dilakukan oleh penjajah di satu sisi menimbulkan penistaan dan penindasan, namun di sisi lain rakyat yang tertindas itu menyerap dan mengembangkan teknologi bagi kepentingan nasionalnya dalam merebut kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, peningkatan SDM militer dilakukan dengan merekrut rakyat yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang tidak berhubungan dengan taktik dan strategi militer secara langsung, namun berhubungan dengan teknologi peralatan yang digunakannya. Oleh karena itu, TNI menerima sarjana dalam kemiliteran sesuai dengan konsepsi Djatikusumo dan Nasution.

Kebijakan tersebut semakin ditingkatkan dengan melakukan pelatihan dan pengalihan teknologi secara bertahap sesuai dengan dinamika politik luar negeri pada masa pemerintahan Indonesia. Ketika gencarnya operasi Trikora dalam merebut Irian Barat, Indonesia mengirimkan prajuritnya berlatih di Uni Soviet dan negara-negara sosialis karena berkaitan dengan teknologi militer yang berasal dari kelompok tersebut. Pergeseran kebijakan luar negeri yang dilakukan kemudian mengarah kepada pembangunan ekonomi akibat krisis ekonomi pada masa sebelumnya membuat pemerintahan berikutnya lebih dekat kepada Blok Barat. Prajurit ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan pelatihan dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan sebagainya seiring modernisasi persenjataan militer yang digunakan berasal dari negara-negara tersebut.

Isu Perang Dingin dan bipolaritas pada era tersebut telah mempengaruhi cara pandang Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Dampak dari proses pembelajaran tersebut telah melahirkan identitas nasional Indonesia dengan hasrat yang kuat untuk memajukan

teknologi dalam negeri yang merupakan produk Indonesia sendiri. Hal ini tentunya muncul sebagai akibat besarnya ketergantungan Indonesia dalam memenuhi suku cadang bagi peralatannya yang berasal dari negara luar. Namun, di sisi lain besarnya kepentingan nasional negara luar tersebut terhadap Indonesia menimbulkan kesadaran nasional untuk membangkitkan teknologi dalam negeri yang lebih mandiri dalam memenuhi peralatan dan perlengkapan militer. Secara gradual dan berkelanjutan dikembangkan industri nasional yang dapat memproduksi peralatan militer sendiri seperti PT. PAL, P.T. Pindad, P.T Dirgantara Indonesia, dan sebagainya yang justru dewasa ini telah mendunia dengan produknya. Sekalipun belum menyentuh pada revolusi dalam urusan militer (*Revolution in Military Affairs/RMA*), namun setidaknya telah terwujud *corner stone* bagi tahapan berikutnya.

Proses pembelajaran ini tidak terlepas dari kesadaran rakyat sipil yang peduli dengan kepentingan pertahanan. Jika pada masa perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan, rakyat bahu-membahu dengan tentara dalam mencapai kemerdekaan, maka dewasa ini urusan pertahanan dilakukan oleh militer sesuai dengan UU No.34/2002, namun peranan sipil tidak terlepas dari pertahanan tersebut. Ribuan ahli dan tenaga kerja sipil dari berbagai disiplin ilmu telah bahu-membahu dalam mengentaskan kesulitan akan kebutuhan peralatan TNI sehingga akhirnya Indonesia berhasil mewujudkan Industri pertahanan dan mengeluarkan produk yang tidak kalah dengan buatan luar seperti senjata SS1, rantis Anoa, dan sebagainya.

Dilihat dari metamorfosis penyerapan teknologi sampai dengan penguasaan dan penerapannya, maka dapat dikatakan betapa pentingnya peningkatan SDM dari waktu ke waktu. Perubahan politik internasional, potensi konflik di masa depan, baik dalam dan ancaman global semakin menuntut SDM yang handal. Jika dahulu kita dipaksa oleh penjajah dan dipaksa oleh keadaan (keterbatasan suku cadang, anggaran, dan embargo), maka dewasa ini kita sendirilah yang harus memaksa diri untuk meningkatkan SDM guna mengikuti dinamika politik internasional yang dinamis menurut SBY (2005) sebagai kondisi *dynamic equilibrium*. Semakin dinamis situasi politik internasional yang beralih dari bipolar, multipolar dan unipolaritas, semakin menuntut dinamisnya SDM TNI untuk dapat menghadapinya.

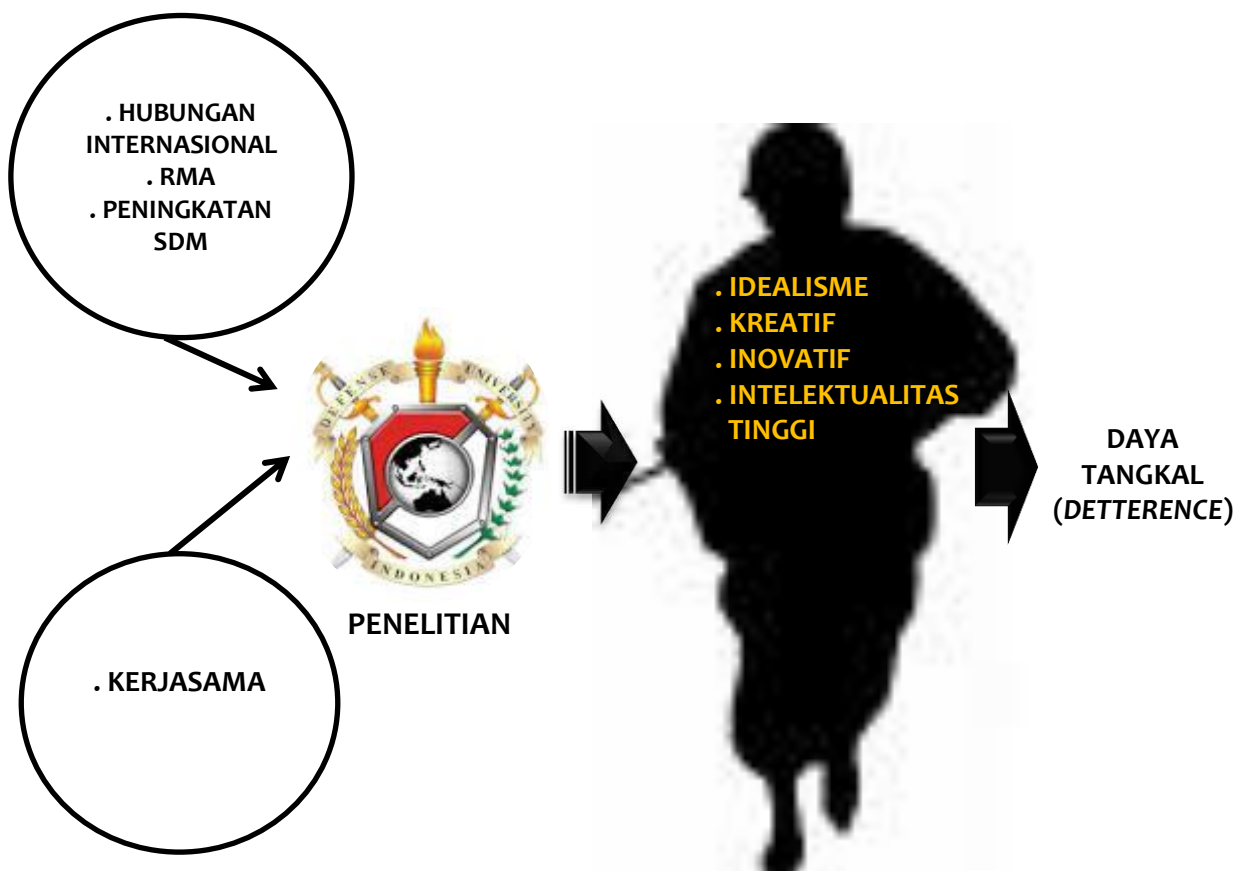
Dengan transformasi yang dilakukan TNI dewasa ini, maka konsepsi strategi besar selayaknya sejalan dengan kebijakan industri pertahanan dan kemungkinan lawan (*opponents*) yang akan dihadapi oleh TNI di masa mendatang. Sebagaimana di negara-negara lain, militer bukan merupakan entitas terpisah dari negara, namun merupakan bagian integral dari kebijakan nasional dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara. TNI bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia baik di darat, laut maupun udara. Dengan demikian, TNI membutuhkan berbagai peralatan yang akan mendukung tugas pokoknya dihadapkan dengan medan, musuh, dan pasukan sendiri serta faktor-faktor khusus sebagai bagian dari mencapai kepentingan nasional. Secara garis besar maka kondisi sistem internasional dan RMA memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dalam membentuk sumber daya manusia yang siap menghadapi persaingan global, namun memiliki idealisme terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Unhan membentuk watak (identitas, nasionalisme, integritas) sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Slamet Iman Santoso bahwa "...pembinaan watak merupakan tugas utama pendidikan..." dalam membentuk SDM yang diharapkan dalam Buku putih pertahanan 2014 yaitu intelegensia yang handal, idealis, kreatif dan inovatif dalam mendukung pengembangan teknologi pertahanan. Kampus-kampus lain sudah mulai sejak lama dalam menganalisis pertahanan yang bekerjasama dengan Kemhan RI seperti UI, UGM dan ITB, dan lain-lain. Kegiatan itu merupakan suatu *corner stone* di masa awal sebelum berdirinya Universitas Pertahanan. Ketika Unhan berdiri (Perpres No.5/2011), maka sudah selayaknya penelitian yang terkait dengan pertahanan dalam perspektif hubungan internasional, RMA, dan peningkatan SDM teknologi pertahanan, dijalankan oleh Unhan lengkap dengan SDM yang berlatar-belakang para akademisi dan praktisi militer yang matang. Dengan demikian, Unhan dapat dilihat oleh publik akan peranannya sebagai *Center of Excellence* dengan tetap berpegang pada budaya luhur bangsa Indonesia yang melahirkan SDM yang memiliki skill, kemampuan, dan kemauan serta integritas yang tidak diragukan lagi.

Lingkungan yang cepat berubah di luar kampus menjadi tantangan bagi Unhan. Globalisasi yang cenderung mengajak perguruan tinggi untuk memperluas ekspansi pasar ditandai dengan hadirnya perguruan tinggi asing, menjadi ancaman serius bagi kelangsungan perguruan tinggi dalam negeri. Lonceng kompetisi sudah dibunyikan untuk

bersaing dalam tataran global. Kondisi ini memaksa perguruan tinggi agar eksis dan mampu meningkatkan pengetahuan, cara kerja dan komitmen. Unhan telah memahami peranan dosen dalam menjalankan kegiatan akademik, mengembangkan diri sesuai dengan fitrah tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam UU No.12/2012. Dengan demikian, kerja sama dalam bentuk penelitian hubungan internasional, RMA dan peningkatan SDM saling terkait dalam memajukan teknologi pertahanan Indonesia yang ditujukan bagi pengabdian kepada masyarakat.

Gambar 3. Visualisasi Peran Unhan



Sumber: hasil elaborasi penulis

Kesimpulan

Tanpa bermaksud menafikkan peranan dari lembaga pendidikan lainnya, dan mengarahkan tumpang tindih peranan serta ego sektoral, maka ditengah supremasi sipil yang saat ini berlangsung dalam era demokrasi di Indonesia, selayaknya peranan untuk mewujudkan SDM yang terbaik bagi perkembangan teknologi militer adalah amalgam

antara sipil militer sebagaimana yang telah diwujudkan oleh para pendahulu (*founding fathers*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Universitas Pertahanan dapat memainkan peran yang demikian luas dalam memberikan kontribusi yang bersifat akademis maupun praktis bagi para pengambil keputusan.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Dewi Fortuna. 1994. *Indonesia in ASEAN. Foreign Policy and Regionalism*. Singapore: ISEAS.
- Arwildayanto, Dr. M.Pd. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Pendekatan Budaya Kerja Dosen Profesional*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Boulter, Nick., Muray, Dalziel., dan Hill, Jackie. 1997. *People and Competencies: the Route to Competitive Advantage*. London: Kogan Page.
- Buku Putih Pertahanan. 2014. Jakarta: Kemenhan RI.
- Chomsky, Noam. 2004. *Hegemony or Survival. America's Quest for Global Dominance*. London: Penguin Group.
- Crabb, Cicol V. Jr. 1972. *American Foreign Policy in the Nuclear Age*. New York: Harper & Row.
- Fisher, Cynthia D., Lyle F. Schoenfeldt, dan James B. Shaw. 1993. *Human Resource Management*, 2th Ed. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
- Griffiths, Martin (Ed). 2007. *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*. New York: Routledge.
- Holsti, K.J. 1976. *International Politics*. New Delhi: New Delhi British of Colombia Pearl Offset Press.
- Kementerian Riset dan Teknologi. 2006. *Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan Indonesia 2005 – 2025*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi.
- Kusumaatmadja, Prof. Dr. Mochtar. 1983. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini* (Kumpulan Karangan dan Pidato). Diedit oleh Edi Damian dan Budiono Kusumohamidjojo. Bandung: Alumni.
- Merkel, Wolfgang. 2005. *Demokrasi di Asia: Sebuah Benua antara Diktator dan Demokrasi*. (Terjemahan CVD. Indarwati Pareira dan Andreas Pareira). Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Metz, Steven dan James Kievit. 1995. *Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theory to Policy*. PA: U.S. Army war College.
- Morgenthau, Hans J. 1948. *Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Octavian, Amarulla. 2012. *Militer dan Globalisasi: Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI* (Cetakan Kedua). Jakarta: UI Press.
- Onuf, Nicholas Greenwood. 1989. *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. South Carolina: University of South Carolina Press.
- Sabir, H.M. 1987. *Politik Bebas Aktif: Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta: C.V. Haji Masagung.
- Siagian, Sondang, P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.

- Sprout, Herald, dan Sprout, Margareth. 1956. *Man-Milieu Relationship Hypothesis in the Context of International Politics*. Princeton: Center of International Studies.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 2008. *Pengantar Ilmu Perang*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Tyson, Shaun. 2006. *Essentials of Human Resource Management (Fifth edition)*. Oxford: Elsevier.
- Waltz, Kenneth N. 1979. *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wright, Quincy. 1957. *The Study of International Relations*. Appleton: Century-Crofts.

Jurnal

- Armstrong, M. dan D. Brown. 1998. "Relating Competencies to Pay: The UK Experience". *Compensation and Benefits Review*. Vol. 30. No.3.
- Cira, D.J. dan E.R. Benjamin. 1998. "Competency Based Pay: A Concept in Evolution", *Compensation and Benefits Review*. Vol.30. No.5.

Undang-Undang dan Perpres

- UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara
- UU No.16/2012 tentang Industri Pertahanan
- UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Perpres No.59 tahun 2013 tentang KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan)

Website

- "Indonesia harus Mampu Bangun Kapal Perang Dan Sipil", 2 Nopember 2011, dalam <http://www.berita.satu.com>, diunduh pada 22 Februari 2015.